

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8
- Satino, Iswahyuni, and Surahmad. "Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 101-110.
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 58–80.
- Manan Bagir . (2011). menjaga kemerekaan pers di pusaran hukum. dewan pers.
- Fardiansyah, A. I. (2013). Persoalan Yuridis Undang-Undang No. 40/1999 Tentang Pers. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 357–366.
- R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia, 1990)
- Ignatius Haryanto, *Digitalisasi dan Media Sosial: Berkah atau Kutukan?*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2012)
- Peraturan Dewan Pers nomor: 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Salim H.S hukum kontrak(teori dan penyusunan kontrak), sinar grafika, jakarta, 2003
- Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)

- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*
- Nasution Latipah, 2020, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Adalah, 4(,3)
- Nasution Latipah, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*, ADALAH *Buletin Hukum dan Keadilan*, (2020), Vol. 6. No. 3
- Junaedi Mahbub, 2020, *Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah*, *Jurnal Islamic Law*, AI Universitas Ibn Khaldun Bogor, 4 (2)
- James W. Nickel, 2017, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, judul asli: *Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, penerjemah: Titis Eddy Arini, Cetakan-7, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 55.
- Muliadi, 2019, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum*, Universitas Muhammadiyah Palu
- Ariyanti Vivi, 2010, *Kebebasan Pers dalam Perspektif pidana*, *Jurnal dakwah dan komunikasi*, STAIN Purwokerto, 4(1), hlm 3.
- Sukardi. Wina Armada. 2019. *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*. Cetakan Ke-2, Jakarta: Dewan Pers.
- Onong Uchjana Effendy, 2015, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Suhaemi dan Ruli Nasrullah. 2009. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Jakarta.
- Septiawan Santana K, 2015. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. cet. Ke- 4.
- Irawan, Jimi. “Walikota Bandar Lampung Ancam Pecahkan Kepala Wartawan Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Bungkam.” *Sindonews*, November 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/226856/174/wali-kota-bandar-lampung-ancam-pecahkan-kepala-wartawan-puluhan-jurnalis-gelar-aksi-bungkam-1604999472>.
- Rezkiyana, D., Akbar, M., & Hasmin, M. Y. (2019). Peranan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), 1647–1657.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/696>
- Mahdi, A. (2015). Kebebasan Pers Dan Hak Publik. *Al-Hikmah*, 8(1), 20–31.

<https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.67>

Agus Sudibyo, “Cermin Retak Kemerdekaan Pers, diakses di <https://malang.aji.or.id/2010/08/27/cermin-retak-kemerdekaan-pers/> pada tanggal 18/04/2023 pukul 20.00

Dewan Pers, tersedia di <http://www.dewanpers.org/dpers.php> diakses tanggal 11/05/2023.

Dewan Pers, “Laporan Akhir Dewan Pers Periode 2007-2010”, Tersedia di <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/buku%20profil%20dewan%20pers.pdf>

Sindo News <https://daerah.sindonews.com/read/942303/174/wartawan-diancam-bunuh-sekber-jurnalis-aceh-barat-gelar-aksi-di-tugu-teuku-umar-1668510707> diakses pada tanggal 10 Maret 2023

Metro Sindo News <https://metro.sindonews.com/read/343690/170/wartawan-dianiaya-saat-liputan-di-kejari-gentangsel-saling-evaluasi-1614034935> diakses pada tanggal 10 Maret 2023

Kompas

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/16/08130981/intimidasi-wartawan-saat-meliput-di-rumah-irjen-ferdy-sambo-berujung> diakses pada tanggal 10 Maret 2023

Pengertian perlindungan hukum., (On-Line), tersedia di <https://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.

<https://www.komunikasipraktis.com/2017/12/pengertian-jenis-jenis-jurnalistik.html>

Pers, UU. “UU 40/1999: Pers.” *DPR RI* (1999): 1-11.